

RELASI MEDIA MASSA DAN POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019

Riyan Alghi Fermansa dan Aidinil Zetra

Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: riyanalghi98@gmail.com; aidinil@soc.unand.ac.id

ABSTRAK. Dalam menentukan ketua tim pemenangan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf memilih Erick Thohir (ET), pemilik surat kabar *Republika*, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang pernah disampaikannya terkait independensi dan afiliasi politiknya selama ini. Pada saat yang lain, *Republika* juga menurunkan berita utama yang dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon, tepatnya pascapenunjukan ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Penelitian ini menganalisa bagaimana relasi media massa, khususnya media massa nasional dan politik pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan dari seluruh pemberitaan *Republika*, sedikit banyaknya media massa turut memperhitungkan simbol politik. Media massa akan mencari sumber berita yang dianggap mampu mendukung pemberitannya. Peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit juga akan disederhanakan melalui *framing* fakta-fakta sehingga layak diterbitkan kepada khalayak ramai. Terkait dengan relasi antara masyarakat dan media massa, masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara terkait dengan relasi antara pemerintah dan media massa, pemerintah tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap media massa.

Kata kunci: Pemilihan Presiden 2019; Relasi Media Massa dan Politik; *Republika*.

ABSTRACT. In determining the chairman of the winning team, The National Campaign Team (TKN) Jokowi-Ma'ruf chose Erick Thohir (ET), owner of the *Republika* newspaper, as the Chairman of TKN Jokowi-Ma'ruf. This contradicts the statement he has made regarding his independence and political affiliation so far. At another time, *Republika* also lowered the headline news are considered to highlight one of the candidates, precisely after the election ET as the Chairman of TKN Jokowi-Ma'ruf. This study analyzes how mass media relations, especially national mass media and politics in the 2019 Presidential Election. The research method used is the analysis of model framing by Robert N. Entman. The results showed that from all *Republika* news, at least the mass media also took into account political symbols. The mass media will look for news sources that are considered capable of supporting its coverage. Long, wide, and complicated events will also be simplified by framing the facts so that they are worthy of publication to the public. Regarding the relations between the community and the mass media, the community is not doing its job properly. Meanwhile, regarding the relations between the government and the mass media, the government does not pay any attention to the mass media.

Keywords: 2019 Presidential Election; Mass Media and Politics Relations; *Republika*.

PENDAHULUAN

Dalam konteks politik modern, media massa tidak saja menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga mempunyai posisi yang sangat sentral dalam politik (Pawito, 2015). Dengan media massa, masyarakat mengetahui segala sesuatu dari para politisi, mulai ide terkait kehidupan masyarakat, pernyataan-pernyataan yang mungkin kontroversial, sampai munculnya para artis yang mencalonkan diri secara tiba-tiba pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg).

Pada perkembangannya, masyarakat semakin bergantung kepada media massa ketika situasi politik tempat tinggal masyarakat mengalami perubahan signifikan. Situasi seperti ini seringkali terjadi saat Pemilihan Umum (Pemilu), adanya konflik antar elit partai politik, sampai krisis politik akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di satu sisi yang lain, media massa sebenarnya memperoleh keuntungan sebab situasi sedemikian rupa memungkinkan media massa tidak bersusah payah mencari bahan informasi untuk dijual kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi dan pemaparan di atas, peneliti mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian "Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia" oleh Adiyana Slamet; penelitian "Relationship in Public Opinion and Mass Media: Formation of Public Opinion through Political Advertising in MNC and MetroTV" (Danang Trijayanto); dan penelitian "Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa" (Tabroni). Penelitian pertama sampai dengan ketiga memperbincangkan relasi media dari perspektif Ilmu Komunikasi.

Pengelompokkan penelitian lain, yaitu penelitian "Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi" dari Effendi Gazali. Penelitian Effendi Gazali memandang relasi media massa dan politik merupakan entitas yang sulit dipisahkan. Gazali (2004) juga menggambarkan perkembangan komunikasi politik, baik di dunia maupun Indonesia. Peneliti menaruh penelitian Gazali berbeda dibandingkan tiga penelitian sebelumnya karena meskipun keempatnya menggunakan perspektif Ilmu Komunikasi, penelitiannya mempunyai studi kasus Indonesia yang lebih komprehensif.

Penggambaran di atas nyatanya tidak memuaskan untuk periode saat ini. Permasalahannya, dengan media massa mencoba profesional, memajukan idealisme dan kode etik jurnalistik, media massa tetap menghadapi kesukaran. Batu penarung yang dihadapi media massa satu di antaranya adalah budaya masyarakat dan elit secara khusus yang paternalistik (Morissan, dkk, 2017). Elit media misalnya, mampu mengontrol informasi atau berita yang dianggap menguntungkan dirinya. Djuyandi, dkk., (2017) menyebutkan sebagai persoalan netralitas media.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti mempunyai kebaharuan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut. Pertama, peneliti mencoba menganalisa relasi media massa dan politik dari perspektif Ilmu Politik. Kedua, peneliti menapak relasi media massa dan politik dengan fokus utama surat kabar nasional di Indonesia. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada media elektronik. Ketiga, studi penelitian yang cukup terbaru, yaitu Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Apalagi untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Pilpres dan Pileg diselenggarakan secara serentak. Pilpres 2019 dianggap unik karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu serentak untuk Pemilu 2019 bukan Pemilu 2014 mengingat tahapan Pemilu saat itu telah berjalan (Triono, 2017). Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu pertama Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin yang diusung di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo); dan kedua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam menentukan ketua tim pemenang, Tim Kampanye Nasional (TKN) menunjuk Erick Thohir (ET), pemilik surat kabar Republika, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. ET dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjadi ketua tim sukses karena kemampuan manajerialnya (Republika, 8 September 2018). Sedang BPN Prabowo-Sandi memilih Djoko Santoso, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sebagai Ketua BPN Prabowo-Sandi.

Ketua tim kampanye atau pemenang sangat penting dalam dua hal, baik secara simbolis ataupun fungsional (Heryanto, 2018). Secara simbolis, merupakan representasi orang yang dapat diterima atau kepercayaan kandidat. Sementara secara fungsional, ketua tim mempunyai peran signifikan dalam manajemen kemenangan, dirigen seluruh

gerak implementasi strategi, sekaligus orang yang dapat menjembatani kepentingan banyak orang.

Dengan ditunjuknya ET, ini bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan terkait independensi dan afiliasi politiknya ketika diwawancarai Republika dalam memperingati ulang tahun Republika yang kedua puluh lima sebagai berikut.

"Inti dari bisnis Republika adalah bagaimana kita konsisten memberikan informasi yang mereka nantinya dapat memilih pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin di Indonesia... Kebetulan juga saya secara pribadi tidak terafiliasi dengan partai manapun" (Republika, 4 Januari 2018).

Meskipun ET menyatakan tidak mempunyai afiliasi politik, dari pernyataannya tadi dapat ditarik simpulan bahwa ET mempunyai kepentingan politik terhadap Republika pada Pilpres 2019. Pada saat yang lain, Republika juga menurunkan berita utama yang dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon, tepatnya pascapenunjukan ET selaku Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf.

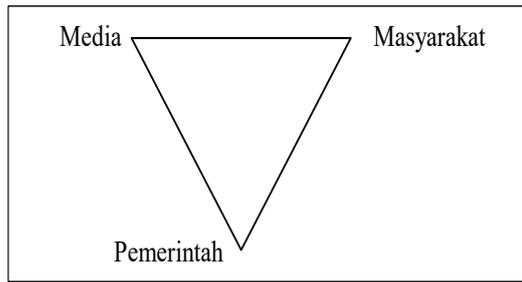
Selanjutnya, peneliti berasumsi relasi yang terjadi antara media massa dan elit politik dalam bentuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon justru menyebabkan salah satu fungsi utama media massa, yaitu kontrol sosial menjadi lemah. ET selaku pemilik telah membawa Republika sebagai media massa arus utama di Indonesia tidak dapat berperan penuh mengontrol kekuasaan negara.

Berkaitan dengan relasi media massa dan politik secara umum sebenarnya dapat dikatakan berjalan cukup lama. Relasi antara kedua entitas terjadi karena tidak wartawan saja membutuhkan para politisi sebagai sumber informasi, melainkan politisi memerlukan media untuk menyampaikan gagasan, termasuk kebijakan yang bakal diputuskan atas nama kepentingan masyarakat.

Meskipun ada hubungan saling membutuhkan, dalam banyak situasi seringkali terjadi ketidakharmonisan antara media massa dan para politisi. Menurut Merrill (dalam Cangara, 2016: 109), permusuhan terjadi karena media massa menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (*watchdog*). Akan tetapi, Merrill juga berpendapat, semestinya media massa bersahabat dan bekerja sama untuk kepentingan orang banyak. Format relasi antara media massa dan politik sendiri dapat digambarkan pada gambar 1.

Dari gambar 1 tampak ada kerja sama antara masyarakat, media massa dan pemerintah. Terkait dengan fungsi pengawasan, tidak media massa dan masyarakat yang mempunyai tugas mengawasi pemerintah, namun setiap pihak mempunyai tugas yang sama saling mengawasi. Dengan demikian, baik masyarakat, media massa, dan pemerintah mempunyai tugas dan fungsi yang sama. Adapun

pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian adalah bagaimana kecenderungan pemberitaan surat kabar Republika selama Pilpres 2019.



Gambar 1. Pola Hubungan antara Masyarakat, Media, dan Pemerintah

Analisis Framing Robert N. Entman: Sebuah Konsepsi

Konsep mengenai *framing*, menurut Robert N. Entman (dalam Eriyanto, 2015), dapat diartikan sebagai bagaimana suatu peristiwa dimaknai dan dikemukakan oleh media massa. Analisis *framing* sendiri, juga menurut Entman, dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu pertama, identifikasi masalah (*problem identification*); kedua, identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*); ketiga, evaluasi moral (*moral evaluation*); dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*).

Identifikasi masalah merupakan elemen pertama dan terpenting dalam menganalisa pemberitaan. Melalui identifikasi masalah, peneliti dapat mengetahui bagaimana isu atau kejadian dipahami oleh media massa. Lalu identifikasi penyebab masalah lebih memandang siapa yang dianggap sebagai aktor peristiwa. Penyebab masalah yang dimaksud nanti tidak terbatas siapa (*who*), tetapi apa (*what*) yang menjadi sumber permasalahan. Bagaimana isu atau kejadian dipahami tidak menutup kemungkinan membuat faktor penyebab dari masalah akan dipahami secara berbeda pula.

Selanjutnya evaluasi moral adalah elemen yang digunakan untuk membenarkan atau menguatkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Bila masalah telah didefinisikan, lalu penyebab masalah telah ditentukan, maka dibutuhkan pendapat yang kuat untuk mendukungnya. Terakhir, saran penanggulangan masalah. Pada bagian ini, penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah. Singkatnya, lebih pada penutup atau kesimpulan dalam berita.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata, baik lisan

maupun tulisan, dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif (Afrizal, 2016). Sedangkan data yang dimaksud dalam penelitian adalah seluruh berita utama Republika selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan proses mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu peristiwa (Satori & Komariah, 2012). Selain dengan menggunakan studi dokumentasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Pengamatan yang dimaksud di sini yaitu mencatat dan memahami substansi berita-berita utama Republika mengenai Pilpres 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan serta menganalisa hasil analisis *framing* terhadap setiap pemberitaan utama Republika terhitung sejak 8 September 2018 sampai dengan hari terakhir masa kampanye Pilpres 2019 (13 April 2019) serta relasi media massa dan politik Indonesia pada Pilpres 2019. Tanggal 8 September 2018 dipilih karena pengumuman terpilihnya ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf terjadi pada 7 September 2018 sehingga berita tersebut baru diturunkan keesokan harinya.

Tabel 1. Daftar Berita Utama Republika selama Pemilihan Presiden 2019

No	Judul Berita Utama	Tanggal Terbit	Hlm
1	Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial	8 September 2018	1
2	Kampanye Dimulai	23 September 2018	1
3	Ikrar Damai	24 September 2018	1
4	Indonesia Sumbang Muslim Berpengaruh	20 Oktober 2018	1
5	Doa untuk Ustaz Arifin Ilham	10 Januari 2019	1
6	Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada	17 Februari 2019	1
7	Capres Siap Hadapi Debat Keempat	30 Maret 2019	1

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti. Tahun 2020.

1. Berita Utama Republika 8 September 2018

Dimulai pada 8 September 2018, Republika menurunkan berita utama dengan tajuk “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial”. Berita utama “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial” terdiri atas dua puluh lima paragraf dan bersambung pada halaman sembilan.

Problem Identification. Republika memulai pemberitaannya ditunjuknya ET sebagai Ketua TKN pada 7 September 2018 dengan menyampaikan inti pemberitaannya secara langsung sebagai berikut.

“JAKARTA – Bakal calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk pengusaha Erick Thohir, sebagai ketua tim pemenangannya... Erick dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjadi ketua tim sukses karena kemampuan manajerialnya (pf. 1).”

Dari kutipan di atas, dapat diidentifikasi Republika ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya pembaca Republika bahwa calon presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih ET, seorang pengusaha sekaligus pemilik media, sebagai ketua tim pemenangannya pada Pilpres 2019. Menurut Jokowi, ET merupakan sosok yang tepat sebagai ketua tim pemenangan karena kemampuan manajerial.

Causal Interpretation. Dalam berita utama “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial”, aktor utama dalam pemberitaan adalah Jokowi. Sedang faktor penyebab pemberitaan, dalam hal ini penyebab calon presiden Jokowi menunjuk ET dipaparkan sebagai berikut.

“Jokowi mengatakan, Erick merupakan sosok pemimpin yang terbukti kemampuannya... mampu membuat perhelatan Asian Games 2018 berjalan sukses dan menuai pujian dari kalangan nasional dan internasional (pf. 3).”

“Menurut Jokowi, masyarakat sudah mengenal sosok Erick... merupakan pengusaha sukses, pemilik media, klub sepak bola, dan klub basket (pf. 4).”

“Jokowi mengaku sengaja memilih ketua tim sukses yang bukan berasal dari partai... hal terpenting yang harus dimiliki ketua timses adalah keahlian dalam manajemen dan mengelola tim (pf. 5).”

Dari tiga paragraf di atas dapat diidentifikasi pula tiga faktor pendorong pasangan calon Jokowi-KH. Ma'ruf memilih ET, pertama, ET ialah pemimpin yang telah teruji kemampuannya; kedua, ET merupakan pengusaha yang sukses, pemilik media, klub sepak bola, dan basket; serta ketiga, tidak dari partai politik dengan memerhatikan kemampuan dalam mengelola organisasi.

Moral Evaluation. ET selaku Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf yang juga pemilik Republika dalam pernyataannya menerima permintaan sebagai ketua tim sukses pasangan calon Jokowi-KH. Ma'ruf sebagai berikut.

“Erick menerima tawaran menjadi ketua timses karena melihat besarnya tekad Jokowi untuk

membangun Indonesia. “Itu jadi pilihan saya,” kata Erick... (pf. 7).”

ET menyatakan, alasannya menerima permintaan Jokowi dan KH. Ma'ruf karena melihat Jokowi mempunyai iktikad yang besar dalam membangun Indonesia. Di samping ET menyatakan mendukung Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin merupakan pilihan pribadinya.

Treatment Recommendation. Sebagai penutup dari pemberitaan penunjukan ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Republika mengutip pendapat Rico Marbun, Direktur Eksekutif Median sebagai berikut.

“Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menilai, langkah Jokowi-Ma'ruf memilih Erick Thohir sebagai ketua timses dan Jusuf Kalla sebagai ketua dewan penasihat merupakan strategi meraih suara dari berbagai lapisan masyarakat (pf. 14).”

Dapat ditarik kesimpulan pasangan calon Jokowi-KH. Ma'ruf cukup beruntung dalam penyusunan komposisi tim pemenangan sebab ET dan Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Republik Indonesia petahana, merupakan manuver tim pemenangan dalam meraih elektoral dari masyarakat. Apalagi ET dan JK sama-sama pengusaha, sehingga diharapkan pula mendapatkan dukungan dari kelompok pengusaha.

2. Berita Utama Republika 23 September 2018

Pada 23 September 2018, Republika menampilkan berita utama dengan judul “Kampanye Dimulai”. Berita utama “Kampanye Dimulai” terdiri atas empat belas paragraf dan terdapat pada halaman pertama Republika.

Problem Identification. Republika memulai pemberitaannya memaklumkan tahapan masa kampanye Pemilu 2019 resmi dimulai sebagai berikut.

“JAKARTA – Kampanye Pemilu 2019 resmi dimulai pada Ahad (23/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghimbau peserta pemilu dan masyarakat sama-sama menjaga ketertiban selama kampanye (pf. 1).”

“Kampanye akan dimulai pada Ahad dan berakhir pada 13 April 2019,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9) (pf. 2).”

Mengutip pernyataan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, Republika menyatakan masa kampanye Pemilu 2019 resmi dimulai pada 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Pada beritanya, Republika menyampaikan himbuan KPU kepada para peserta Pemilu dan masyarakat

agar sama-sama menjaga ketertiban selama masa kampanye Pemilu.

Causal Interpretation. Dalam pemberitaannya, Republika menyampaikan hal-hal berkaitan dengan masa kampanye Pemilu 2019. Adapun informasi yang disampaikan Republika adalah sebagai berikut.

“... masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung selama tujuh bulan. KPU meminta kepada semua peserta pemilu dan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan masa kampanye ini (pf. 3).”

“Peserta kampanye Pemilu 2019 adalah dua pasangan capres-cawapres, para caleg DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Selama masa kampanye, para peserta boleh melakukan berbagai jenis kegiatan kampanye, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka... dan kampanye media sosial (pf. 5).”

Masa kampanye seperti dalam laporan Republika berlangsung selama tujuh bulan. Para peserta kampanye Pemilu 2019 meliputi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Selain itu, kegiatan kampanye yang diatur dalam Pemilu 2019 diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka, dan kampanye melalui media sosial.

Moral Evaluation. Berkaitan dengan telah dimulainya masa kampanye Pemilu, pihak TKN Jokowi-Ma'ruf menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

“... Erick Thohir mengatakan, pemilu bukan ajang perseteruan... Lebih dari itu, pemilu perlu dimaknai sebagai perayaan proses demokrasi untuk memperjuangkan visi, gagasan, dan program menuju Indonesia maju (pf. 10).”

“Mari kita sambut pesta demokrasi Indonesia dan mari kita dukung terus Jokowi-Ma'ruf #IndonesiaMaju, kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Sabtu (pf. 11).”

ET berpendapat, Pemilu dapat diartikan sebagai bagian dari merayakan demokrasi. Lebih jauh bagian dari merayakan demokrasi, yaitu dengan saling beradu ide, gagasan, dan program demi kemajuan Indonesia. Pada proses *framing*, pihak yang terlibat dalam penyuntingan berita tidak media massa semata, tetapi pihak yang mempunyai kepentingan (Sobur, 2015). Secara tidak langsung, tindakan di atas dilakukan oleh Republika dengan keterangan tertulisnya.

Treatment Recommendation. Republika pada akhir berita utamanya mencoba mengemukakan pernyataan Andre Rosiade, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi terkait dengan dimulainya masa kampanye Pemilu.

“Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade memastikan tim kampanyenya dan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin telah sepakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan sejuk... (pf. 13).”

“Saya menangkap akan ada pertemuan rutin tim Prabowo dan Pak Jokowi untuk berkoordinasi penyelesaian masalah di lapangan yang terjadi, ujar Andre... (pf. 14).”

Dari paragraf di atas disampaikan BPN Prabowo-Sandi telah mencapai kesepakatan dengan TKN Jokowi-Ma'ruf membuat suasana Pemilu yang damai. Bahkan, Andre menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan rutin antara dua tim pemenangan selama Pemilu. Pertemuan tersebut bertujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Berita Utama Republika 24 September 2018

Berikutnya, pada 24 September 2018, Republika menurunkan berita utama “Ikrar Damai”. Berita “Ikrar Damai” sendiri terdiri atas sebelas paragraf, satu gambar kegiatan, dan letak berita pada halaman pertama.

Problem Identification. Sebagaimana diberitakan Republika, seluruh peserta Pemilu termasuk dua pasang calon presiden bersama dengan seluruh partai politik peserta Pemilu menyongsong deklarasi damai sebagai berikut.

“JAKARTA – Seluruh peserta Pemilu 2019 pada Ahad (23/9) mengikrarkan janji damai dalam berkampanye di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Ada tiga hal penting dalam deklarasi yang diikrarkan... (pf. 1).”

“Kami, partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji; Satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil... (pf. 2).”

“Dua, melaksanakan kampanye yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks... “Tiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku... (pf. 3).”

Dalam deklarasi damai, para peserta Pemilu melakukan ikrar secara bersama-sama. Terdapat tiga hal penting yang diikrarkan oleh para peserta Pemilu, yaitu mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), melaksanakan kampanye yang aman, tertib, berintegritas, tanpa hoaks, dan melakukan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Causal Interpretation. Para aktor dalam berita kali ini, yaitu Arief Budiman, Ketua KPU; Wahyu Setiawan (Komisioner KPU); dua kandidat calon

presiden dan wakil presiden; KH. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal); dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

“Setelah pembacaan ikrar kampanye damai, seluruh peserta menandatangani deklarasi damai... Peserta kemudian secara simbolis melepaskan burung merpati (pf. 4).”

“... Sebelumnya deklarasi damai, dilakukan pembacaan doa oleh Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar. Acara ditutup dengan menyanyikan jingle Pemilu... (pf. 10).”

Sebelum kegiatan dimulai, para peserta mengikuti doa bersama yang dipimpin oleh KH. Nasaruddin. Selesai mengikrarkan kampanye damai, para peserta melakukan penandatanganan naskah kampanye damai. Sebagai penutup kegiatan, para peserta melepaskan burung merpati diiring lagu Pemilu.

Moral Evaluation. Ada hal menarik dari kegiatan kampanye damai di mana seluruh peserta deklarasi mengenakan pakaian adat. Meskipun, dalam gambar jua terdapat beberapa peserta mengenakan pakaian batik.

“Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Bali dengan sepatu selop, sementara Kiai Ma’ruf Amin mengenakan kemeja dan jas dengan sarung yang melingkar di pinggangnya. Mereka berjalan sambil mengacungkan jari telunjuk penanda angka 1, nomor urut Jokowi-Ma’ruf... Sedangkan Kiai Ma’ruf mengacungkan tangannya sambil sesekali bergoyang ditemani Erick Thohir (pf. 7).”

“... Dengan kemeja krem khas Jawa, Prabowo mengenakan blangkon sebagai penutup kepala, sementara Sandiaga memakai peci berwarna hitam... (pf. 10).”

Pada deklarasi tersebut, calon presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Bali, Sementara calon wakil presiden KH. Ma’ruf, dengan setelan kemeja, jas, dan sarung yang melingkar, peneliti mengidentifikasi sebagai pakaian adat Banten. Calon presiden nomor urut dua Prabowo, mengenakan pakaian adat Jawa. Sedang Sandiaga, pendamping Prabowo, mengenakan pakaian adat Melayu.

Kembali merujuk konsep analisis *framing* di mana mempunyai fungsi mencermati seleksi, penonjolan, atau pertautan fakta suatu berita agar mempunyai makna lebih menarik dan mudah diingat (Sobur, 2015). Dengan memanfaatkan keterbatasan halaman dan kolom, Republika mencoba menyederhanakan peristiwa yang panjang agar layak diterbitkan. Pada paragraf ketujuh, Republika menyampaikan ET, pemilik Republika, hadir dalam kegiatan tersebut. Pada hal ini membuktikan

setidaknya dari hal yang dipandang urgen terlihat arah pembentukan berita Republika.

Treatment Recommendation. Dalam berita “Ikrar Damai”, Republika menawarkan pendapat Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait terselenggaranya deklarasi kampanye damai sebagai berikut.

“Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan seluruh relawan maupun pendukung antarcalon presiden maupun partai politik tetap saling menyapa ketika bertemu... “Saling sapa, kan teman sendiri... (pf. 11).”

Dalam pandangannya, dengan adanya deklarasi kampanye damai diharapkan para pendukung dan simpatisan antarcalon presiden dan partai politik tetap menjalin silaturahmi. Di antara para pendukung, tidak menutup kemungkinan merupakan teman, tetangga, atau anggota keluarga sendiri.

4. Berita Utama Republika 20 Oktober 2018

Pada bulan Oktober, tepatnya pada 20 Oktober 2018, Republika menurunkan berita utama “Indonesia Sumbang Muslim Berpengaruh”. Indonesia menyumbang dalam daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh di dunia, di mana salah satu nama tertera adalah calon presiden Jokowi.

Problem Identification. Republika menyatakan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RSISC) telah merilis daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh di dunia sebagai berikut.

“AMMAN – Pusat Studi Strategis Islami Kerajaan Yordania memasukkan sejumlah tokoh Islam dari Indonesia ke dalam 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia... (pf. 1).”

“... Pusat Studi Strategis Islami Kerajaan Yordania (RSISC) yang diklaim sebagai institusi riset independen... institusi internasional Islam yang tak terikat dengan negara manapun, meski bermarkas di Amman, Yordania (pf. 3).”

Dari dua paragraf di atas diterangkan RSISC, sebuah lembaga penelitian independen yang berpusat di Amman, Yordania, telah merilis daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh di dunia.

Causal Interpretation. RSISC dalam menentukan standar seorang tokoh Muslim mempunyai pengaruh diterangkan Republika sebagai berikut.

“Tolak ukur pengaruh para tokoh itu dinilai dari siapa pun yang memiliki kekuasaan, baik secara budaya, ideologi, keuangan, maupun politik, untuk membuat perubahan dan memberikan dampak signifikan bagi dunia Islam (pf. 4).”

RSISC dalam menentukan standar tokoh Muslim berpengaruh di dunia menggunakan tiga standar utama. Pertama, tokoh Muslim, terlepas dari

latar belakang apapun; kedua, dengan kekuasaan yang dipunyai tokoh tersebut, mampu menciptakan perubahan; dan ketiga, terdapat dampak signifikan untuk dunia Islam.

“Dalam daftar itu, Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj dan Habib Luthfi bin Yahya masuk dalam 50 tokoh Muslim 2019 berpengaruh di dunia. Jokowi berada di posisi-16, sementara Said Aqil Siraj di posisi ke-20 (pf. 6).”

Dari daftar lima ratus tokoh Muslim, RSISC menempatkan Jokowi pada peringkat keenam belas. Tokoh Muslim Indonesia lainnya, yaitu KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, pada peringkat kedupuluh. Sementara Muhammad Luthfi Ali Yahya atau akrab disapa Habib Luthfi bin Yahya pada peringkat ketiga puluh tujuh.

Moral Evaluation. Dalam berita Republika, masuknya nama calon presiden pejawat dalam daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh dipandang dengan beberapa pendapat.

“Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai daftar yang disusun RSISC sedianya memiliki maksud baik. Kendati demikian, patokan keberpengaruhan yang mereka pakai tidak dilihat secara substantif... (pf. 10).”

“Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, tokoh yang dianggap berpengaruh harus dapat dijadikan tolak ukur dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara (pf. 11).”

Din dari Muhammadiyah berpandangan, daftar rilis RSISC mempunyai maksud baik dengan catatan tidak memperhatikannya secara substantif saja. Sedang Amirsyah, Wakil Sekretaris Jenderal MUI berpendapat, para tokoh yang terdapat dalam daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh dapat dijadikan sebagai ukuran dalam mengambil kebijakan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara oleh masyarakat.

Untuk kesekian kalinya, peneliti menemukan ketidaksesuaian dari pemberitaan Republika. Dalam berita “Indonesia Sumbang Muslim Berpengaruh”, seluruh narasumber memberikan pandangannya bersinggungan dengan daftar RSISC, utamanya calon presiden Jokowi. Kenyataannya, Prabowo sebenarnya ada dalam daftar tersebut. Nama Prabowo tergabung dalam kategori tokoh Muslim sangat populer di media sosial (Al-Khraisha, dkk, 2019).

Tamburaka (2013) menggambarkan proses *framing* merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyuntingan berita. G.J. Aditjondro (dalam Sobur, 2015) juga menyatakan salah satu proses

framing ialah reporter berhak menentukan orang yang akan diwawancarai. Pada berita ini, Republika tampak tidak memberikan ruang sama sekali terhadap keterpilihan dua calon presiden dalam daftar tokoh Muslim berpengaruh RSISC secara berimbang.

Treatment Recommendation. Republika dalam menutup berita utamanya mengutip pernyataan dari Maman Imanulhaq, Ketua Lembaga Dakwah PBNU.

“Ketua Lembaga Dakwah PBNU Maman Imanulhaq, memandang Jokowi sudah membuktikan implementasi nilai Islam, diantaranya kejujuran, kesantunan, dan transparansi... (pf. 13).”

Maman Imanulhaq menyampaikan, tidak diragukan kembali keislaman dari calon presiden Jokowi. Dengan terpilihnya Jokowi, membuktikan dirinya dalam mengambil keputusan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Kembali merujuk Sobur (2015), dalam hal pemilihan kata, media massa pun mempunyai sifat memperhitungkan simbol politik. Salah satu cara yang dilakukan media massa dalam memperhitungkan simbol politik adalah menetapkan narasumber. NU sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendamping calon presiden Jokowi, yaitu KH. Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

5. Berita Utama Republika 10 Januari 2019

Pada 10 Januari 2019, Republika melansir berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”. Berita “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham” terdiri atas satu gambar, tiga belas paragraf, dan bersambung pada halaman sembilan surat kabar.

Problem Identification. Dalam berita “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”, Republika menginformasikan terlebih dahulu berkenaan dirawatnya Ustaz Arifin sebagai berikut.

“JAKARTA – Doa untuk kesembuhan Ustaz Arifin Ilham terus mengalir dari berbagai kalangan. Para tokoh pun secara bergantian membesuk Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra... (pf. 1).”

Pada kalimat pembukanya, Republika ingin menggerakkan hati masyarakat agar mendoakan kesembuhan Ustaz Arifin sama halnya mengalirnya para tokoh yang membesuk di rumah sakit. Pada paragraf selanjutnya, Republika mengabarkan kunjungan para calon presiden sebagai berikut.

“Kemarin, Ustaz Arifin dijenguk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi tiba di RSCM pukul 08.05 WIB, sedangkan Prabowo datang membesuk pukul 16.30 WIB (pf. 2).”

Pada paragraf kedua, terdapat kerancuan dari berita Republika. Dalam penyebutan posisi atau

jabatan, Jokowi disebutkan sebagai Presiden RI. Sementara Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Hal ini kontradiktif pada gambar berita utama yang menyatakan keduanya sebagai calon presiden. Dengan kata lain, terdapat informasi yang hendak disodorkan Republika, yaitu jabatan presiden calon petahana Jokowi.

Causal Interpretation. Pada pemberitaan “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”, Republika mendeskripsikan kunjungan dua kandidat seperti di bawah ini.

“Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menuju ruang perawatan Ustaz Arifin tanpa memberikan pernyataan... Begitu pula saat ia meninggalkan lokasi. Ia bergegas ke Istana Negara untuk melantik Kepala BNPB yang baru (pf. 3).”

“Kita semua mendoakan agar beliau cepat sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT dan berkegiatan kembali, berdakwah, kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (pf. 4).”

Republika menceritakan kehadiran Jokowi yang tampak terburu-buru. Setelah Presiden Jokowi tiba pun, Jokowi langsung memasuki ruang perawatan Ustaz Arifin tanpa memberikan pernyataan. Kendati demikian, Jokowi baru menyampaikan pernyataannya di Istana Negara. Adapun calon presiden Prabowo sebagaimana diberitakan Republika sebagai berikut.

“Prabowo juga membagikan foto dirinya melalui akun *Twitter* saat menjenguk Ustaz Arifin. Prabowo tampak menggunakan pakaian khasnya, baju safari cokelat... (pf. 6).”

Dalam pemberitaannya, Republika tidak menerangkan secara spesifik kunjungan calon presiden Prabowo. Tambahan Republika justru mendeskripsikan kunjungan Prabowo dengan mengutip akun *Twitter* Prabowo sendiri. Sedang pada paragraf sebelumnya, Republika dapat memberikan informasi dengan jelas jam kunjungan Prabowo.

Moral Evaluation. Secara umum, Republika memberitakan penghargaan bertalian dengan hadirnya para tokoh, termasuk dua calon presiden sebagai berikut.

“Ustaz Muslih dari Majelis Zikir Az-Zikra yang terus menemani Ustaz Arifin mengatakan, kondisi Ustaz Arifin berangsur membaik. Ustaz Arifin sering melemparkan senyum kepada para tokoh... (pf. 8).”

“Beliau tetap menerima tamu, meski kita batasi demi kesehatan... dan terus melempar senyum,” ujar Ustaz Muslih saat dihubungi (pf. 9).”

Kendatipun Ustaz Muslih menyatakan, membatasi kunjungan para tokoh dengan tujuan kesehatan dan pemulihan Ustaz Arifin. Akan tetapi, Ustaz

Muslih juga menyebutkan bahwa Ustaz Arifin Ilham acapkali melemparkan senyum kepada para tokoh yang membesuknya di rumah sakit.

Treatment Recommendation. Dalam berita “Doa untuk Ustaz Arifin”, Republika dalam memaknakan kehadiran para tokoh serta dirawatnya Ustaz Arifin di pembaringan rumah sakit sebagai berikut.

“Dia mengatakan, selain Jokowi dan Prabowo, banyak tokoh lainnya yang menjenguk Ustaz Arifin, diantaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga para ulama. Dia berharap umat terus mendoakan Ustaz Arifin agar segera diangkat penyakitnya... (pf. 10).”

Banyak tokoh nasional yang datang membesuk Ustaz Arifin, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, sampai dengan para ulama. Dalam pernyataannya, Ustaz Muslih mengutarakan harapan agar umat Islam terus menerus mendoakan kesembuhan Ustaz Arifin.

6. Berita Utama Republika 17 Februari 2019

Pada bulan Februari, tepatnya pada 17 Februari 2019, Republika menyiarkan berita utama bertajuk “Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada”. Berita “Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada” terdiri enam belas paragraf dan didudukkan pada halaman muka.

Problem Identification. Pada aspek ini, Republika menyampaikan terlebih dahulu perhelatan yang akan diselenggarakan oleh KPU sebagai berikut.

“JAKARTA – Debat pemilihan presiden putaran kedua akan digelar malam ini. Dalam debat itu, analisis masing-masing capres di sektor energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur akan diuji (pf. 1).”

Republika melansir perhelatan yang akan diselenggarakan KPU, yaitu debat publik putaran kedua hanya diikuti para calon presiden peserta Pilpres 2019. Tajuk yang diperdebatkan dalam debat diantaranya, energi, pangan, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Causal Interpretation. Terkait persiapan para calon, Republika mengabarkan persiapan dari tiap-tiap calon presiden menghadapi debat seperti berikut. “Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap menghadapi debat putaran kedua. Dia mengaku akan menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai presiden... (pf. 2).”

Jokowi dalam mempersiapkan diri mengaku tidak mempunyai permasalahan. Maksudnya adalah

sebagai petahana, Jokowi akan menyampaikan kinerja pemerintah yang dipimpinnya selama empat tahun terakhir. Lebih jauh KH. Ma'ruf, pendamping Jokowi, memaklumkan penjelasan Jokowi seperti di bawah ini.

“Selain sudah berpengalaman, menurut dia, Jokowi sudah menguasai tema... Dia sudah [punya] pengalaman, ucap Kiai Ma'ruf (pf. 5).”

Kebalikannya, Prabowo seperti disampaikan oleh Andre Rosiade lebih menekankan pada visimisinya dalam bidang swasembada energi dan pangan.

“... Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, menjelaskan, Prabowo telah menguasai seluruh materi terkait dengan topik debat... (pf. 7).”

“Prabowo juga akan menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjadikan Indonesia produsen biodiesel dunia. Di sisi lain, dia juga melakukan kebijakan revitalisasi 88 juta-90 juta hektare hutan rusak (pf.9).”

“Kemudian, topik swasembada pangan... Prabowo akan mendorong sektor pertanian menjadi sektor pertumbuhan ekonomi (pf. 11).”

“Sementara, mengenai infrastruktur... intinya ada dua hal. Pertama, perencanaan yang matang... Kedua, bagaimana pembangunan infrastruktur tidak membebani APBN atau menambah utang (pf. 13).”

Menurut Andre, pada sektor energi, Prabowo akan membuat Indonesia sebagai produsen biodiesel dunia. Dalam sektor pangan, Prabowo mendorong sektor pertanian. Sedang sektor infrastruktur, berfokus pada perencanaan yang matang dan mandiri dalam pendanaan.

Sebagaimana disampaikan oleh G.J. Aditjondro (dalam Sobur, 2015), *framing* melibatkan pula pihak-pihak yang mempunyai singgungan dengan isu tertentu. Kepada pasangan calon presiden nomor urut satu, Republika dapat memilih dua narasumber sekaligus, yaitu Jokowi dan KH. Ma'ruf. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut dua, Republika sekadar memilih Andre Rosiade, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi.

Moral Evaluation. Dalam berita utama “Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada”, Republika menyebutkan pandangan dari KPU sebagai pihak penyelenggara debat sebagai berikut.

“... Kepala Biro Teknis dan Humas KPU Nur Syarifah mengatakan, panggung untuk debat capres sudah disiapkan. Semua peralatan pun sudah terpasang... (pf. 14).”

“Dalam debat... panitia berupaya mendorong peserta debat tidak hanya berdiri di belakang

podium... Capres bisa duduk, berdiri, atau berjalan ke tengah... (pf. 15).”

Pada penyelenggaraan debat putaran kedua, KPU menjelaskan panggung debat telah disiapkan dengan baik. KPU mendorong para calon tidak hanya berdiri di belakang podium mengingat pada debat sebelumnya, masyarakat melihat debat sangat kaku dan membosankan. Oleh karenanya, panitia menyarankan para calon dapat melakukan duduk, berdiri, atau berjalan ke tengah panggung.

Treatment Recommendation. Sebagai penutup, Republika menyampaikan format penyelenggaraan debat kedua dengan peserta para calon presiden sebagai berikut.

“KPU membagi debat ke dalam lima segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi-misi. Segmen kedua dan ketiga adalah pertanyaan panelis... Kelima, yaitu masing-masing kandidat bertanya kepada kandidat lain... (pf. 16).”

Dalam laporan pemberitaan Republika, KPU menginginkan debat putaran kedua lebih menarik dibanding debat sebelumnya. Dengan demikian, KPU melakukan beberapa perubahan, seperti salah satunya adalah forum debat. Dengan adanya perubahan format debat, diharapkan debat para kandidat dapat lebih santai dan eksploratif dalam menyampaikan visi dan misinya.

7. Berita Utama Republika 30 Maret 2019

Setelah hampir satu bulan lebih tidak menurunkan berita utama terkait Pilpres 2019, Republika menurunkan berita utama dengan judul “Capres Siap Hadapi Debat Keempat”. Berita utama “Capres Siap Hadapi Debat Keempat” mewartakan persiapan para calon presiden menghadapi debat keempat atau terakhir. Laporan utama persiapan para calon terdiri atas sebelas paragraf dan terdapat pada halaman pertama.

Problem Identification. Dalam berita utamanya, Republika memulai wartanya berkenaan dengan persiapan para calon presiden menghadapi debat sebagai berikut.

“JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan berhadapan dalam debat keempat... Tiap-tiap kubu menyatakan kesiapannya (pf. 1).”

Para calon presiden, dalam hal ini Jokowi dan Prabowo akan berhadapan kembali pada debat putaran keempat. Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo telah berhadapan pada debat putaran kedua 17 Februari 2019 lalu. Dalam pemberitaan Republika disampaikan masing-masing kandidat siap bertanding dalam debat.

Causal Interpretation. Merujuk judul berita *Republika*, dua calon presiden diwartakan tengah melakukan persiapan menghadapi debat putaran keempat. Persiapan para calon presiden sebagaimana dilansir *Republika* adalah sebagai berikut.

“Jokowi sebagai capres pejabat mengatakan, ia tak melakukan persiapan khusus... “*Enggaklah*, dulu awal itu *aja* dengan Kiai Ma’ruf kita melakukan simulasi biasa aja,” ujar Jokowi (pf. 2).”

“Meski begitu, ia mengklaim telah siap menghadapi debat nanti... akan mempersiapkan data yang valid apabila dibutuhkan dalam debat (pf. 3).”

Dari penuturan calon presiden Jokowi, dirinya mengatakan tidak melakukan persiapan khusus menjelang debat terakhir. Meskipun demikian, Jokowi akan mempersiapkan data-data valid dalam silang pendapat nanti. Pada paragraf selanjutnya, tepatnya paragraf keempat, Jokowi menyatakan kegiatannya sebagai berikut.

“Sehari menjelang debat, Jokowi tidak melakukan kampanye terbuka... memilih berada di Istana Kepresidenan Bogor guna menyelesaikan berbagai hal administratif... Mulai dari pagi tadi urusannya itu, katanya (pf. 4).”

Tidak dapat dihindari dengan menerangkan skedul kegiatan calon petahana Jokowi, disertai dengan pengutipan langsung pernyataan Jokowi, *Republika* terlibat dalam pemilihan simbol politik. Dari liputan *Republika* disampaikan, Jokowi selaku presiden tetap bekerja menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan. Dengan demikian, pemberitaan *Republika* pada fragmen ini menjadi multitafsir, sehingga dapat diinterpretasikan dan dimaknai banyak pemahaman.

Moral Evaluation. Dalam debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden, *Republika* mengemukakan pendapat dari tiap tim pemenangan calon presiden, dalam hal ini TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi sebagai berikut.

“Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) KH. Ma’ruf Amin, menilai pasangannya lebih berpengalaman dibanding Prabowo Subianto dalam hal strategi keamanan nasional... Jokowi sudah berpengalaman di posisi lebih tinggi mengurus keamanan nasional (pf. 5).”

KH. Ma’ruf, sebagai pendamping Jokowi menerangkan, Jokowi tidak kalah dibandingkan dengan Prabowo. Dapat diperkirakan fundamen berpendapat KH. Ma’ruf mengacu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 10 yang menyatakan presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi tiga matra. Juga Undang-Undang (UU) Pertahanan

Negara Pasal 12 yang menyebutkan presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan perang Republik Indonesia.

“Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Sadi, juga optimistis Prabowo bakal unggul dalam debat... Sudirman meyakini, modal pendalaman isu membuat Prabowo mendominasi jalannya debat (pf. 9).”

“Sudirman mengatakan, Prabowo berkomitmen dalam terbentuknya pemerintahan yang bersih bila terpilih dalam Pilpres... (pf. 10).”

Sudirman selaku Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi yakin terhadap kesiapan Prabowo. Dengan memahami isu-isu debat, diharapkan Prabowo dapat mendominasi debat. Sudirman juga menyatakan komitmen Prabowo akan terbentuknya pemerintahan yang bersih ke depannya. Untuk diketahui tema debat terakhir ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri.

Kembali terlihat perbedaan pemberitaan *Republika*, terutama dalam pemilihan narasumber. Pada berita-berita utama sebelumnya, *Republika* dapat mewawancarai secara langsung pasangan calon Jokowi-KH. Ma’ruf. Sementara BPN Prabowo-Sandi, *Republika* memilih anggota tim sukses nomor urut dua seperti Andre Rosiade dan Sudirman Said.

Treatment Recommendation. Bersinggungan dengan penyelenggaraan debat terakhir, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyampaikan kepercayaan dan keinginannya seperti berikut.

“... Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat pendukung capres... tidak datang ke lokasi debat di Hotel Shangri-La, Jakarta. “Kita mengharapkan masyarakat ikut serta menciptakan suasana kondusif, ikut berpartisipasi agar kegiatan berlangsung lancar,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono... masyarakat pendukung pasangan calon yang ingin menonton bersama di berbagai wilayah agar tetap menjaga ketertiban (pf. 12).”

Dari pihak kepolisian, Yuwono meminta masyarakat, khususnya pendukung pasangan calon, tidak hadir di lokasi debat. Masyarakat diminta turut berperan menciptakan suasana yang kondusif. Secara tidak langsung, Polda Metro Jaya melontarkan usulan agar masyarakat menonton bersama dengan tetap memerhatikan ketertiban.

Dari seluruh pemberitaan utama *Republika* selama Pilpres 2019, sedikit banyaknya surat kabar *Republika* melakukan proses pembingkai dalam pemberitaannya. Dalam pemilihan kata, *Republika* amat memperhitungkan simbol politik. Hal ini

tampak ketika Republika dalam menentukan sumber berita yang dianggap mampu mendukung atau memperkuat pemberitaannya. Pada berita utama “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial” misalnya, Republika memilih Rico Marbun (Direktur Eksekutif Median). Rico berpendapat bahwa terpilihnya ET merupakan pilihan yang sangat tepat dari calon presiden Jokowi.

Pola pemilihan sumber berita yang mendukung berita-berita utama Republika selama Pilpres 2019 tidak semata-mata pada berita utama terpilihnya ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Akan tetapi, pada berita-berita utama lainnya. Berita utama “Indonesia Sumbang Muslim Berpengaruh” pada 20 Oktober 2018 ditutup dengan mengutip pernyataan dari Maman Imanulhaq, Ketua Lembaga Dakwah PBNU. NU sendiri merupakan ormas asal calon wakil presiden pendamping Jokowi.

Selain itu, secara umum hampir keseluruhan gambar berita utama Republika juga mendukung pemberitaan pasangan calon presiden nomor urut satu selama ini. Setidaknya mengenai hal ini tampak pada gambar-gambar berikut.



Gambar 2. Gambar Berita Utama Republika 8 September 2018



Gambar 3. Gambar Berita Utama Republika 10 Januari 2019

Pada berita utama Republika pasacapenunjukan ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Republika menampilkan foto pengumuman ketua tim pemenang pasangan calon presiden nomor urut satu oleh calon presiden Jokowi pada 7 September 2018. Dalam foto tampak ET berfoto bersama dengan JK (Ketua Tim Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf), Jokowi, dan KH. Ma’ruf. Sementara di belakang tampak para

sekretaris jenderal partai politik pendukung, seperti Verry Surya Hendrawan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Arsul Sani (PPP), dan Hasto Kristyanto (PDIP).

Kemudian gambar berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham” yang mencitrakan dua calon presiden, baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama membesuk Ustaz Arifin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM). Republika tetap memberikan perhatian khusus kepada calon presiden Jokowi. Paragraf kedua berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham” menyatakan Ustaz Arifin dijenguk oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.

Terkait model relasi antara masyarakat, media massa, dan pemerintah sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dalam konteks Pemilu, publik dapat dikatakan tidak “menjalankan” tugasnya dengan baik. Masyarakat tidak mempunyai animo cukup tinggi mengamati pemberitaan Republika selama Pilpres 2019. Sobur (2015) dalam catatannya menuliskan saat ini dengan semakin tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat, pembaca media terkena apa yang disebut dengan *Headline Syndrome*. *Headline Syndrome* merupakan jenis pembaca yang lebih tertarik membaca judul berita utama ketimbang isi pemberitaan secara keseluruhan.



Gambar 4. Salah Satu Feed Instagram @republikaonline yang Memuat Berita Utama Republika selama Pilpres 2019

Pada akun media sosial *Instagram*, Republika menampilkan warta sakitnya Ustaz Arifin Ilham dengan mengutip paragraf pertama berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”. Komentar masyarakat—warga internet (warganet)—cukup beragam. Dari akun @hasanhasbullah (Hasan Has) yang memberikan testimoninya mengenai Ustaz

Arifin yang sangat dekat dengan umat Islam. Akun @rusydafz (Rusyda Fauzana) juga menyampaikan doa agar Ustaz Arifin diangkatkan penyakitnya oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sayangnya, masyarakat tidak menyadari framing yang dilakukan oleh Republika.

Sementara terkait relasi antara pemerintah dan media massa, khususnya Republika, pemerintah tidak menaruh perhatian lebih. Apalagi pemimpin presiden saat itu merupakan calon presiden petahana. Di samping itu, pada pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, pemerintah mendapatkan sokongan penuh dari banyak partai politik. Dari partai-partai tersebut, sekurangnya terdapat dua partai politik yang dipimpin oleh pemilik media massa. Partai NasDem merupakan partai politik yang dipimpin oleh Surya Paloh, pemilik kelompok usaha media massa *Media Group*. Kedua, Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo yang juga pemilik Media Nusantara Cita (MNC) *Group*. Pada Pemilu selanjutnya, tepatnya Pilpres 2019, Jokowi mendapatkan dukungan dari tiga orang pemilik media massa arus utama di Indonesia, yaitu Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, dan ET.

SIMPULAN

Berkaca pada sesuatu yang dilakukan ET pada Pilpres 2019, dengan turut sertanya pemilik media dalam politik praktis, maka sangat mempengaruhi independensi media massa. Meski media massa mempunyai sifat sekadar melaporkan suatu peristiwa, kenyataannya media massa turut memperhitungkan simbol politik. Dalam banyak pemberitaan, Republika menetapkan sumber berita kerap tidak proporsional. Kepada pasangan calon presiden nomor urut satu, Republika selalu melakukan pengutipan langsung kepada calon presiden Jokowi dan wakil presiden KH. Ma'ruf Amin. Sementara kepada pasangan nomor urut dua, Republika hanya mengutip pernyataan dari anggota tim kemenangan Prabowo-Sandi.

Ke depannya media massa diharapkan mampu mengambil sikap tegas terhadap pemilik media massa. Pengalaman Pilpres 2014 semestinya menjadi pembelajaran berharga bagi media massa. Kepada masyarakat, diharapkan agar mampu bersikap kritis dalam menginterpretasikan isi berita. Masyarakat tidak sekadar membaca, menonton, maupun mendengarkan, melainkan menganalisa lebih dalam isi pemberitaan.

Bagi peneliti lain, dapat mengembangkan lebih jauh kajian mengenai relasi media massa dan politik, terutama Pemilu di Indonesia. Apalagi masyarakat masih tetap menjadikan informasi dari media massa sebagai referensi dalam memahami berbagai realitas

politik. Terlebih perkembangan media global dan nasional ikut memberikan akses terhadap sumber informasi yang beragam sehingga informasi menjadi melimpah ruah (Prawira, dkk, 2021). Peneliti lain dapat menelaah setiap informasi yang disajikan media melalui judul rencana, berita wawancara, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Khraisha, L., dkk. (2019). *The World's 500 Most Influential Muslims 2019*. Amman: The Royan Islamic Strategic Studies Centre.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djuyandi, Y., Prawira, I., Irawan, R.E. (2017). Media Neutrality in Indonesian Presidential Election 2014. *Advanced Science Letters*, 23 (5), 4816-4819.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Gazali, E. (2004). Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 53-74.
- Heryanto, G. G. (2018). Basis Kekuatan Tim Pemenangan. Diakses pada 3 Februari 2020, dari <https://m.media.indonesia.com/kolom-pakar/183636/basis-kekuatan-tim-pemenangan>
- Morissan, dkk. (2017). *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pawito. (2015). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Prawira, I., dkk. (2021). Objektivitas Tiga Media Siber Indonesia: Studi Konten Berita Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Wacana Politik*, 6(2), 95-107.
- Satori, D. & Komariah, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, A. (2016). Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 10(2), 119-126.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Tabroni. (2012). Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 105-116.
- Tamburaka, A. (2013). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trijayanto, D. (2015). Relationship in Public Opinion and Mass Media: Formation of Public through Political Advertising in MNC and MetroTV. *Jurnal Promedia*, 1(2), 21-37.
- Triono. 2017. Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 156-164.